

PERUBAHAN STRUKTUR PENDUDUK AKIBAT PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA DI PROPINSI BALI

*Ida Bagoes Mantra**

Abstract

Tourism industry in the Province of Bali has rapidly developed lately. This has consequently led to the increase of the number of both foreign and domestic tourists who come to visit Bali.

The rapid development of tourist industry in Bali has certain impacts on the existing demographic structure. As an example, the population growth in the tourist areas has increased considerably caused by the number of migrants who came to the region. Most of these people are non-permanent migrants of which the exact number is never known. If prior to the 1970s the population were clustered in the fertile regions, the population distribution has now changed to following the distribution of tourist industry.

Tourist industry may stimulate the people of the rural areas to utilize the present existing economic opportunities. Development both in physical and non-physical aspects in the rural areas is followed by the improvement of transport facilities. These close relations have positively influenced the slight demographic structural difference between urban and rural.

Pendahuluan

Propinsi Bali yang luasnya 5.632,86 km², terdiri dari delapan kabupaten dan satu kotamadia Denpasar, 51 kecamatan dan 612 desa/ kelurahan. Propinsi Bali di samping merupakan daerah pertanian yang subur, juga merupakan daerah pariwisata yang penting di Indonesia. Sejak Perang Dunia II, Pulau Bali telah dikunjungi oleh wisatawan asing, tetapi arus wisatawan tidak terlalu besar sehingga dampak terhadap sosial budaya tidak besar pula.

Perhatian yang besar terhadap pengembangan kepariwisataan di Bali dimulai sejak tahun 1960-an yang

ditandai dengan diresmikannya Hotel Bali Beach di Sanur pada tahun 1966. Hotel ini merupakan hotel bertaraf internasional pertama di Bali. Adanya hotel yang representatif ini mengakibatkan perkembangan kepariwisataan menjadi semakin pesat. Dalam jangka waktu sepuluh tahun di Bali bermunculan hotel-hotel yang cukup bagus. Bersamaan dengan ini, pemerintah Bali mulai mengidentifikasi dan mengembangkan kawasan wisata yang potensial, yang disertai pula dengan pembenahan terhadap sarana dan prasarana perhubungan di Bali.

* Prof. Ida Bagoes Mantra, PhD. adalah staf peneliti pada Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada dan staf pengajar pada Fakultas Geografi UGM.

Menghadapi perkembangan yang semakin pesat ini, sebenarnya pemerintah Bali telah menyadari beberapa kemungkinan dampak yang akan muncul terhadap kehidupan sosial ekonomi dan kultural masyarakatnya. Untuk menanggulangi beberapa dampak negatif yang mungkin timbul, pemerintah Bali mulai mengadakan pembagian zone pengembangan pariwisata yang dipusatkan di bagian selatan Pulau Bali, yaitu di sekitar Nusa Dua, Sanur, dan Kuta. Di tempat-tempat ini sejak sepuluh tahun yang lalu dibangun hotel-hotel bertaraf internasional maupun tempat-tempat penginapan yang merupakan perkampungan wisatawan. Dengan cara ini, interaksi secara langsung antara penduduk setempat dengan wisatawan hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu saja.

Kebijakan semacam ini mengakibatkan masyarakat Bali yang berada di pedalaman hanya merupakan objek kunjungan wisatawan dan bukan objek domisili. Asumsinya, dengan semakin kecilnya interaksi penduduk lokal dengan wisatawan, semakin kecil pula dampak negatif yang terjadi. Selain itu, dengan dipusatkannya aktivitas wisatawan di daerah bagian selatan Pulau Bali, kelestarian terhadap kebudayaan Bali akan tetap berlangsung.

Dalam perkembangan selanjutnya, hal ini ternyata tidak dapat berlangsung seperti yang diharapkan. Hotel-hotel dan tempat penginapan banyak bermunculan di sepanjang Pantai Bali, seperti Candi Dasa, Legian, Kerobokan, dan Lovina. Di daerah pedalaman pun terjadi perkembangan yang sangat pesat,

yang terpusat di daerah Ubud dan sekitarnya.

Di samping pengembangan tempat-tempat objek wisata di Bali, prasarana transport dan komunikasi diperbaiki dan ditingkatkan. Landasan pacu bandara internasional Ngurah Rai pada tahun 1990 diperpanjang dari 2,7 km menjadi 3 km. Dengan perpanjangan landasan pacu bandara udara Ngurah Rai, penerbangan langsung ke negara-negara pemasok wisatawan misalnya Jepang, Australia, dapat dilaksanakan. Pelabuhan penyeberangan Ketapang (Jawa) - Gilimanuk (Bali) juga ditingkatkan fasilitasnya sehingga siap melayani penyeberangan selama 24 jam. Di samping itu, Pelabuhan Laut Padang Bai sering dirapati kapal-kapal niaga dan wisatawan asing.

Dengan peningkatan prasarana ini, jumlah wisatawan asing dan dalam negeri yang datang ke Bali makin lama makin meningkat. Menurut catatan dari DIPARDA Bali (1986), jumlah wisatawan asing yang masuk ke Bali selama tahun 1980-1986 sebanyak 1.273.268 orang. Jumlah penumpang yang masuk ke Bali pada periode yang sama melewati darat, udara, dan laut sebagai berikut:

lewat darat =	6.018.455 orang (63,9 persen)
lewat udara =	3.352.029 orang (35,6 persen)
lewat laut =	51.220 orang (0,5 persen)

Jumlah	= 9.421.704 orang (100,0 persen)
--------	----------------------------------

Kebanyakan migran masuk tersebut merupakan migran sirkuler yang terdiri atas wisatawan asing dan wisatawan dalam negeri.

Jenis pariwisata di Bali adalah Pariwisata Budaya, pariwisata yang menitikberatkan pada perkembangan

segi-segi budaya. Menurut Geriya (1983), budaya yang dimaksud adalah kebudayaan Bali yang bersumber pada agama Hindu; karena itu, kebudayaan Bali bersifat religius.

Banjar merupakan organisasi sosial tradisional orang Bali atas dasar ikatan wilayah. Organisasi ini merupakan bagian dari desa yang menjalankan tugas-tugasnya baik yang bersifat keramat maupun yang bersifat sekuler. Menurut Geriya (1983) konsep operasional dari organisasi ini mencakup dua komponen pokok, yaitu sebagai berikut.

1. Komponen manusia sebagai pendukung dan penggerak organisasi yaitu manusia yang pada hakikatnya mempunyai persepsi sikap dan perilaku tertentu berkaitan dengan organisasi tersebut.
2. Komponen sosial budaya yang pembangunan organisasinya terdiri dari komponen ideal (awig-awig banjar), komponen kependudukan yang ditempati oleh sejumlah personal dan komponen peralatan.

Ciri-ciri tersebut di atas melahirkan kehidupan kemasyarakatan yang bersifat sosio-religius dan kehidupan keagamaan yang dijabarkan dalam pelaksanaan kehidupan sehari-hari.

Dengan memperhatikan ciri-ciri banjar dan desa di Bali dan mengingat pula sifat pariwisata di Bali adalah pariwisata budaya, maka objek wisata di Bali berpusat di pedesaan. Wisatawan manca negara maupun domestik datang ke desa. Sebagai konsekuensi logis dari jenis pariwisata ini, maka pengembangan industri pariwisata ini tidak hanya di pusat-pusat domisili wisata, tetapi di desa-desa kunjungan dan desa-desa penunjang.

Prasarana fisik (transportasi dan komunikasi, penerangan listrik, serta prasarana lain) dibangun di pedesaan. Hubungan desa dengan pusat-pusat wisata sangat lancar, yang mempunyai dampak luas bagi pembangunan pedesaan. Kegiatan pariwisata dapat meningkatkan sektor pertanian, pembuatan alat-alat rumah tangga, anyaman, sulaman, kerajinan rakyat, kesenian rakyat, dan hiburan.

Wisatawan asing datang ke Bali ingin melihat kebudayaan Bali yang khas, misalnya tari-tarian, ukir-ukiran, dan kain dengan corak tradisional. Untuk dapat memenuhi kebutuhan ini di beberapa desa muncul perkumpulan-perkumpulan kesenian, yang setiap saat kalau dibutuhkan dapat menyajikan kesenian itu kepada para wisatawan.

Dengan memperhatikan hal tersebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pembangunan industri pariwisata di Bali, tidak hanya mempunyai dampak pada desa-desa pusat wisata seperti Sanur, Kuta, dan Nusa Dua, tetapi juga pada desa-desa kunjungan dan penunjang. Komponen-komponen lingkungan yang terkena dampak adalah komponen fisik, biotis, sosial, ekonomi, budaya, dan kesehatan masyarakat.

Dalam makalah ini ditinjau dampak pembangunan industri pariwisata di Propinsi Bali terhadap variabel kependudukan. Variabel tersebut antara lain meliputi jumlah dan persebaran penduduk, pertumbuhan penduduk, mobilitas penduduk, dan kualitas penduduk.

Perubahan Struktur Penduduk

Perubahan struktur penduduk yang akan disoroti ini adalah perubahan pada dasa warsa terakhir yaitu tahun 1980

hingga tahun 1990. Tahun-tahun ini merupakan usaha serius pemerintah untuk mengembangkan sektor pariwisata menjelang Tahun Kunjungan Indonesia 1991.

Pertumbuhan Penduduk

Industri pariwisata di suatu wilayah merupakan pusat pertumbuhan (*growth center*) di wilayah tersebut. Sejalan dengan pertumbuhan *growth center* ini, timbul pula aktivitas-aktivitas lain seperti tumbuhnya sektor informal, jasa, dan perdagangan. Pertumbuhan penduduk meningkat karena tingginya migran masuk yang menuju ke wilayah ini, misalnya, Kecamatan Kuta dan Kecamatan Denpasar Selatan di Kabupaten Badung. Di Kecamatan Kuta

terdapat kawasan pariwisata Kuta dan Legian dan di Kecamatan Denpasar Selatan terdapat kawasan pariwisata Sanur.

Dari hasil peneacahan lengkap Sensus Penduduk Tahun 1990, dapat diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk per tahun di kawasan wisata lebih tinggi daripada daerah-daerah lain dalam satu kabupaten. Sebagai contoh pada periode 1980-1990 rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk Kecamatan Kuta sebesar 2,18 persen dan Kecamatan Denpasar Selatan sebesar 5,39 persen. Kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Badung yang letaknya jauh dari pusat pariwisata misalnya Mengui, Abiansemal, dan

TABEL 1.
JUMLAH DAN LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK DI BEBERAPA KECAMATAN
DI KABUPATEN BADUNG DAN KODIA DENPASAR, 1980-1990

Kecamatan/Kabupaten dan Kodia	Jumlah Penduduk		Laju pertumbuhan* penduduk 1980-1990
	1980	1990	
KAB. BADUNG			
Kuta	81887	101589	2,18
Mengwi	76676	84612	0,99
Abian Semal	60942	65888	0,66
Petang	23532	23351	-0,08
KODIA DENPASAR			
Denpasar Selatan	56835	95829	5,36
Denpasar Timur	91996	118883	2,60
Denpasar Barat	112432	173732	4,45
JUMLAH	504300	663084	2,78

* Rumus Laju Pertumbuhan Penduduk adalah:

$$P_t = P_o (1 + r)^t \text{ di mana:}$$

P_o = jumlah penduduk per tahun n dasar

r = rata-rata tingkat pertumbuhan penduduk per tahun

t = selisih antara tahun dasar dengan tahun proyeksi

P_t = jumlah penduduk pada tahun t

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Bali (1982, 1991)

Petang masing-masing tingkat pertumbuhan penduduknya sebesar 0,99, 0,66, dan -0,08 persen (Tabel 1.).

Secara keseluruhan, laju pertumbuhan penduduk di Propmsi Bali cukup rendah. Pada periode tahun 1980-1990 rata-rata laju pertumbuhan penduduk tiap tahun sebesar 1,18 persen, sedangkan pada periode tahun sebelumnya (1971-1980) angkanya lebih tinggi yaitu 1,69 persen, dan 1,77 persen pada periode tahun 1961-1971. Sebagai perbandingan, laju pertumbuhan penduduk Indonesia pada periode tahun 1980-1990 sebesar 1,97 persen. Di antara 8 kabupaten di Bali, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Badung tertinggi yaitu 2,78 persen disusul oleh Kabupaten Buleleng (1,04 persen) dan Gianyar (0,96 persen; Tabel 2.). Dari Tabel 2. ini jelas terlihat bahwa di kabupaten yang mempunyai kawasan industri pariwisata seperti Badung dan Gianyar laju pertumbuhan penduduknya per tahun lebih tinggi dibandingkan

dengan kabupaten-kabupaten lain, kecuali Buleleng.

Perkembangan industri pariwisata tidak hanya berpengaruh pada desa-desa domisili tempat hotel-hotel dan fasilitas pariwisata lain berada seperti Sanur, Kuta, dan Nusa Dua, tetapi pengaruhnya terasa pada desa-desa kunjungan wisata ataupun desa-desa lain. Fasilitas-fasilitas transport, penerangan listrik, air bersih, dan tempat-tempat budaya dibangun di desa-desa karena pariwisata Bah adalah pariwisata budaya. Pembinaan-pembinaan tersebut menyebabkan desa-desa yang pada tahun 1980 bersifat pedesaan (*rural*), pada tahun 1990 bersifat perkotaan (*urban*).

Kota-kota di Bali juga berkembang dengan pesat. Fasilitas-fasilitas seperti *shopping center*, *super market*, bank, telepon, dan lain-lain terdapat di kota-kota dan di pusat-pusat industri pariwisata. Fasilitas transport, baik darat, laut, maupun udara dibangun

TABEL 2.
RATA-RATA LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK PER TAHUN
MENURUT KABUPATEN DAN DESA-KOTA TAHUN 1980-1990 (PERSEN)

Kabupaten	Kota	Desa	Kota + Desa
Jembrana	5,30	-0,05	0,60
Tabanan	10,59	-0,94	0,11
Badung	8,50	-1,99	2,78
Gianyar	11,16	0,14	0,96
Klungkung	8,66	-2,29	0,12
Bangli	3,91	0,60	0,88
Karangasem	7,03	-0,53	0,89
Buleleng	2,94	0,58	1,04
Bali	7,29	-0,30	1,18

Sumber: BPS (1991).

sehingga hubungan desa dengan kota, Bali dengan pulau-pulau lain, atau dengan negara lain berjalan dengan lancar.

Kesemua aktivitas di atas menyebabkan laju pertumbuhan penduduk di perkotaan sangat tinggi. Perbedaan tingkat pertumbuhan penduduk antara desa dengan kota tinggi sekali (-0,30 persen dibanding 7,29 persen pada periode tahun 1980-1990).

Untuk perkotaan, Kabupaten Gianyar mempunyai laju pertumbuhan penduduk tertinggi (11,16 persen) disusul oleh Kabupaten Tabanan (10,59 persen), Klungkung (8,66 persen), dan Badung (8,50 persen). Kabupaten Buleleng mempunyai laju pertumbuhan penduduk kota terendah yaitu 2,94 persen.

Apabila dilihat angka laju pertumbuhan penduduk per kecamatan di Propinsi Bali, terlihat bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di kecamatan-kecamatan Kuta, Denpasar Selatan, Denpasar Timur, Sukawati, Negara, Tabanan, Kubu, Sukasada, dan Buleleng berkisar antara 1,43-5,36 persen.

Kepadatan Penduduk

Sejalan dengan tingginya laju pertumbuhan penduduk kawasan wisata di Bali, maka kepadatan penduduk di kawasan ini juga tinggi. Sebagai contoh pada tahun 1980 kepadatan penduduk di Desa Sanur sebesar 1717 orang/km², malia pada tahun 1990 meningkat menjadi 2502 orang/km², jadi selama kurun waktu 10 tabun terjadi peningkatan kepadatan penduduk sebesar 45,7 persen. Kepadatan penduduk untuk desa-desa wisata Kuta pada tahun 1980 dan 1990 terlihat dalam Tabel 3.

Dari Tabel 3. dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk 5 desa kawasan wisata Kuta pada tahun 1990 tinggi (melebihi kepadatan penduduk Pulau Bali), besarnya 493 orang/km². Penduduk Desa Tuban sangat padat (3200 orang/km²) dan meningkat 64,4 persen dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk tahun 1980. Desa Kuta walaupun kepadatan penduduknya di bawah Desa Tuban, tetapi menunjukkan angka di atas 1000 dan meningkat sebesar 26,9 persen

TABEL 3.
KEPADATAN PENDUDUK DESA-DESA WISATA KUTA, 1980 DAN 1990

Desa	Kepadatan penduduk (org/km ²)		Peningkatan (%)
	1980	1990	
Kerobokan	800	897	12,1
Kutan	1061	1347	26,9
Tuban	1947	3200	64,6
Jimbaran	482	585	21,4
Benoa	398	518	30,2

Sumber: Kantor Statistik Propinsi Bali (1991).

dibandingkan dengan angka kepadatan penduduk tahun 1980.

Di daerah kawasan yang lain, misalnya Ubud didapat pula hal yang sama seperti di kawasan wisata Kuta. Kepadatan penduduk Desa Ubud pada tahun 1990 sebesar 2239 orang/km². Angka kepadatan penduduk desa-desa lain yang ada di kawasan wisata Ubud ini di atas 1000 orang/km²; misalnya Desa Mas (1587 orang/km²), Desa Kedewatan (1286 orang/km²), dan Desa Peliatan (1079 orang/km²); (Kantor Statistik Propinsi Bali, 1991).

Desa Ubud merupakan daerah tujuan wisata sejak lama. Para wisatawan tidak hanya berkunjung ke objek wisata ini, juga banyak yang menginap atau tinggal di *homestay* atau tempat tinggal penduduk. Secara geografis, letak wilayah Desa Ubud sangat strategis. Desa ini diapit oleh desa-desa yang terkenal sebagai desa kerajinan dan seni di Bali. Desa Peliatan terkenal dengan seniman-seniman tarinya, Desa Mas terkenal dengan produksi patung kayu hitam dengan motif tradisional, dan Desa Tegallalang merupakan tempat seniman-seniman patung kontemporer yang memproduksi patung naturalis seperti pohon-pohon dan buah-buahan. Desa Ubud sendiri terkenal sebagai pusat perkembangan seni lukis di Bali (Mantra dan Kutaneegara, 1990).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa peta persebaran penduduk di Pulau Bali sejak tahun 1980 mengalami perubahan. Sebelum tahun 1980, pola persebaran penduduk mengikuti pola pertanian. Daerah-daerah yang mempunyai potensi pertanian yang baik mempunyai kepadatan penduduk yang tinggi. Sebagai contoh, daerah Bali Selatan merupakan dataran aluvial yang

subur, penduduknya sangat padat. Jadi untuk wilayah Bali Selatan penduduk mengelompok di Kabupaten Badung Selatan (kecuali daerah Bukit), sebagian di daerah Kabupaten Gianyar, Klungkung, dan Tabanan. Dewasa ini dengan meningkatnya pembangunan industri pariwisata, maka pola persebaran penduduk Pulau Bali juga dipengaruhi oleh pusat-pusat aktivitas pariwisata. Hal ini dapat dilihat bahwa sebelum tahun 1980, penduduk daerah Bukit di Kabupaten Badung Selatan sangat jarang, tetapi dewasa ini kepadatan penduduknya meningkat lebih-lebih di kawasan wisata Nusa Dua.

Sejalan dengan meningkatnya laju pertumbuhan penduduk di perkotaan Bali, maka persentase penduduk yang bermukim di perkotaan juga meningkat. Pada tahun 1971 persentase penduduk yang bermukim di perkotaan sebesar 9,8 persen; pada tahun 1980 dan 1990 masing-masing menjadi 14,7 persen dan 26,4 persen. Jadi terjadi peningkatan sebesar 4,9 persen antara tahun 1971 dan 1980 dan 11,7 persen antara tahun 1980 dan 1990. Pada tahun 1990 persentase tertinggi dari penduduk yang bermukim di Kabupaten Badung (59,2 persen) diikuti oleh Kabupaten Kelungkung (33,0 persen) dan Kabupaten Buleleng (21,7 persen) (Tabel 4.).

Peningkatan proporsi penduduk yang bermukim di perkotaan disebabkan adanya pusat-pusat pertumbuhan yang baru (*growth center*), terutama pusat-pusat industri pariwisata. Di samping itu, beberapa desa yang pada tahun 1980 berstatus desa, pada tahun 1990 berubah statusnya menjadi kota. Proses ini disebut dengan reklasifikasi.

TABEL 4.
PERSEBARAN PENDUDUK MENURUT KABUPATEN DAN KOTA-DESA
PROPINSI BALI TAHUN 1990

Kabupaten	Kota (Urban)		Desa (Rural)		Kota + Desa	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
Jembrana	33.723	15,5	183.876	84,5	217.599	7,8
Tabanan	56.234	16,1	293.300	83,9	349.534	12,6
Badung	392.800	59,2	270.284	40,8	663.084	23,9
Gianyar	40.700	12,1	296.038	87,9	336.738	12,1
Klungkung	49.731	33,0	100.762	67,0	150.493	5,4
Bangli	17.601	10,0	158.795	90,0	176.396	6,4
Karangasem	26.153	7,6	317.260	92,4	343.413	12,4
Buleleng	117.295	21,7	422.804	78,2	540.099	19,4
Bali	734.237	26,4	2.043.119	73,6	2.777.356	100,0

Sumber: BPS (1991).

Mobilitas Penduduk

Di muka telah disebutkan bahwa meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk di kawasan wisata Bali disebabkan tingginya jumlah migran masuk ke kawasan ini. Mereka umumnya berasal dari Jawa, Lombok, bahkan ada yang berasal dari Pulau Timor. Di samping bekerja pada industri pariwisata itu sendiri, ada juga yang bekerja pada sektor-sektor lain, misalnya pemandu wisata, perdagangan, usaha di bidang angkutan, dan buruh. Mereka terdiri dari migran permanen yang menetap di Bali dan migran nonpermanen. Data migran permanen dapat dimonitor karena para migran harus mengajukan permohonan resmi untuk tinggal menetap pada Pemda setempat, tetapi tidak untuk migran nonpermanen sehingga jumlah mereka sulit untuk dimonitor.

Untuk Propinsi Bali, jumlah migran permanen keluar lebih besar dibandingkan dengan jumlah migran

permanen yang masuk sehingga didapatkan jumlah migran neto yang negatif. Hal ini merupakan salah satu faktor rendahnya laju pertumbuhan penduduk tiap tahun di propinsi ini, terutama untuk pedesaan (Tabel 2.).

Sejalan dengan peningkatan aktivitas industri pariwisata di Bali, jumlah migran masuk meningkat dengan cepat dan lebih cepat daripada peningkatan migran keluar. Kalau pada tahun 1985 jumlah migran keluar hampir 3 kali jumlah migran masuk, tetapi pada tahun 1990 jumlah migran keluar hanya 2 kali jumlah migran masuk sehingga jumlah migran netonya telah menurun. Kalau pada tahun 1985 jumlah migran neto negatif 4 persen dari jumlah penduduk, maka pada tahun 1990 migran neto menjadi negatif sebesar 3,8 persen (Tabel 5.).

Umumnya migran yang keluar dari Propinsi Bali terdiri dari para transmigran dan hanya sebagian kecil terdiri dari migran spontan yang mencari pekerjaan di luar Bali. Dengan

TABEL 5.
JUMLAH MIGRAN SEMASA HIDUP YANG MASUK, KELUAR
PROPINSI BALI TAHUN 1971, 1980, DAN 1990

Tahun	Migran masuk		Migran keluar		Migran neto	
	Jumlah	Persen*	Jumlah	Persen*	Jumlah	Persen*
1971	22.758	1,1	37.072	2,7	-34.314	-1,6
1980	65.271	2,6	117.828	4,8	-52.557	-2,2
1985	53.897	2,0	159.011	6,0	-105.115	-4,0
1990	114.919	4,1	221.599	7,9	-106.650	-3,8

* Persentase didasarkan atas jumlah penduduk propinsi pada tahun yang bersangkutan.

Sumber: BPS, 1975; 1983; 1987; dan 1992.

meningkatnya pasaran kerja di Propinsi Bali dan meningkatnya tingkat ekonomi rumah tangga penduduk, maka dalam dasawarsa terakhir ini jumlah transmigran yang keluar Propinsi Bali menurun. Pada Pelita III jumlah transmigran yang diberangkatkan berjumlah 56.351 orang (atau 13.223 KK), pada Pelita IV menurun menjadi 22.893 orang (6.892 KK), dan pada Pelita V (hingga tahun 1991) jumlah transmigran yang diberangkatkan sebesar 8.180 orang (2.387 KK); (Departemen Transmigrasi Propinsi Bali, 1991).

Di samping migran masuk yang menetap, terdapat pula migran masuk yang tidak berniat menetap di Bali. Mereka terdiri dari pekrja bangunan, pedagang keliling, dan pekerja-pekerja sektor informal. Jumlah mereka tidak dapat diketahui karena kedatangannya ke Bali tidak melapor pada pemerintah setempat. Namun demikian, dari hasil observasi didapat bahwa jumlah mereka lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang menetap.

Apabila migran nonpermanen ikut diperhitungkan sebagai migran masuk di

samping migran permanen, diperkirakan jumlah migran masuk lebih besar daripada migran keluar. Migran nonpermanen yang masuk ke Bali di samping berdampak positif, juga berdampak negatif.

Dari hasil pemantauan di pusat pariwisata di Nusa Dua, Jimbaran, dan Kedonganan, para pekerja migran umumnya berasal dari Jawa Timur, Jawa Barat, dan Lombok. Umumnya mereka berasal dari keluarga petani miskin, bahkan ada yang berasal dari keluarga tani yang tidak memiliki lahan pertanian.

Pembangunan kawasan wisata di beberapa tempat di Bali banyak membutuhkan tenaga kerja dan kebutuhan ini tidak dapat dicukupi oleh tenaga kerja lokal di Bali. Umumnya tenaga kerja lokal kurang berminat untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kasar seperti menggali parit, membuat lubang fondasi, dan lain-lain.

Tersedianya prasarana transport yang lancar dan keberadaan kawan atau famili di daerah tujuan merupakan dua faktor eksternal yang merangsang penduduk melakukan mobilitas di kawasan pariwisata Bali. Keadaan ini

sesuai dengan pendapat Mabogunje (1970) yang mengatakan bahwa migran lama merupakan fasilitator bagi terserapnya migran baru ke daerah tujuan.

Konsentrasi pekerja migran pada kawasan pariwisata ini menyebabkan timbulnya perumahan kumuh, tindak kriminal dan terjadi kecemburuan sosial antara penduduk pendatang dengan penduduk setempat dalam hal memperoleh pekerjaan dan usaha-usaha lain.

Tenaga kerja dari luar Propinsi Bali, terutama yang berasal dari Pulau Jawa, tidak hanya bekerja pada proyek-proyek pariwisata, tetapi juga bekerja pada sektor-sektor lain misalnya sektor informal sebagai pedagang keliling, pedagang kaki lima, dan buruh di sektor pertanian, bahkan mereka sudah menyusup ke daerah-daerah pedesaan. Banyak buruh pemetik padi, pekerja bangunan dijumpai di pedesaan di Bali, bahkan penjual bakso pun sudah banyak terdapat di sana.

Hadirnya pekerja-pekerja migran pedesaan di Bali karena banyak dari mereka tidak tertampung di kota lalu meluber ke pedesaan. Di samping itu, banyak tenaga kerja di pedesaan bekerja di kota atau di proyek-proyek pembangunan, dan kekurangan tenaga kerja di pedesaan diisi oleh pekerja-pekerja imigran.

Suatu fenomena mobilitas penduduk yang menarik adalah terjadinya mobilitas penduduk lokal dari kawasan wisata menuju ke daerah pedalaman di Kabupaten Tabanan dan Buleleng. Lahan-lahan mereka dibeli oleh para investor dengan harga yang tinggi. Pada tahun 1990 di kawasan pariwisata Kedonganan dan Jimbaran, harga 1 m²

lahan tegal Rp. 1.000.000,00. Petani-petani yang lahannya kena pembebasan tanah mendadak menjadi kaya. Sebagian dari uangnya dibelikan lahan pertanian di daerah pedalaman dengan harga yang tinggi (100 m² lahan sawah seharga Rp 1.500.000,00). Dengan harga sebesar ini, penduduk setempat tidak mampu membeli lahan di desa mereka sendiri.

Komposisi Penduduk

Arus imigran yang menuju ke kawasan wisata akan berpengaruh terhadap komposisi penduduk di kawasan tersebut; sebagai contoh bervariasinya kelompok etnis, umur, pekerjaan, dan pendidikan.

Kelompok Etnis

Migran yang datang ke Bali terutama ke kawasan wisata datang dari seluruh penjuru tanah air. Dengan demikian, penghuni di wilayah tersebut terdiri dari bermacam-macam kelompok etnis. Di kawasan wisata Sanur, Kuta, dan Nusa Dua, etnis Jawa merupakan kelompok etnis yang dominan. Budaya dan agama mereka berbeda-beda sehingga di kawasan wisata terjadi percampuran antara budaya satu dengan yang lain (termasuk budaya lokal) dan keadaan ini sering menimbulkan konflik sosial di antara kelompok suku yang bermukim di wilayah tersebut.

Timbul pertanyaan, sejauh mana budaya Bali dapat bertahan dengan adanya gempuran budaya dari luar yang datang bersama dengan arus imigran. Menurut teori difusi, terpengaruh tidaknya budaya lokal oleh budaya asing sangat tergantung pada kuat dan tidaknya benteng budaya setempat. Suatu hal yang menggemhirakan ialah

mulai ada kesadaran di antara para pemuda untuk menekuni budaya dan agama dan aktif melaksanakan upacara ritual. Diharapkan situasi seperti ini merupakan benteng yang kukuh dalam menghadapi penetrasi budaya dari luar.

Umur dan Jenis Kelamin

Migran yang datang ke Bali berumur migran potensial (15-44 tahun). Pada fase konstruksi dari pembangunan proyek pariwisata ini, migran yang datang selain dalam usia migran potensial, juga kebanyakan terdiri dari laki-laki. Jadi pada masa konstruksi perbandingan jenis kelamin (seks-rasio) besarnya lebih dari 100.

Pada waktu pascakonstruksi, sebagian buruh-buruh bangunan pulang ke desa asal karena kontrak mereka sudah selesai. Pada saat itu berdatangan pula migran-migran baru dengan kualitas lebih baik, yang akan bekerja pada proyek pariwisata tersebut atau pada sektor-sektor tertentu. Tidak hanya migran laki-laki yang masuk, tetapi juga migran perempuan sehingga rasio jenis kelamin mendekati 100 bahkan kurang dari 100.

Pekerjaan

Pembangunan industri pariwisata di suatu wilayah memungkinkan terjadinya mobilitas penduduk vertikal bagi penduduk setempat yang masih bertempat tinggal di wilayah tersebut. Sebelum dibangun industri pariwisata di suatu wilayah, misalnya di Nusa Dua, sebagian besar penduduknya bekerja pada sektor pertanian dan nelayan. Setelah dibangun kawasan pariwisata di daerah ini, maka sebagian besar penduduk bekerja pada sektor nonpertanian.

Dengan berubahnya pekerjaan dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian khususnya di sektor pariwisata, maka tenaga kerja tersebut mulai terikat dengan waktu. Dalam situasi seperti ini timbul perubahan-perubahan dalam perilaku budaya, misalnya penyesuaian waktu gotong-royong terutama untuk peristiwa-peristiwa yang bersifat suka seperti perkawinan, kelahiran, dan lain-lain. Dalam peristiwa-peristiwa yang bersifat duka, sifat kegotongroyongan tidak berubah. Hal ini jelas terlihat dari hasil penelitian mengenai dampak sosial budaya industri pariwisata di Ubud yang dilakukan oleh Mantra dan Kutaneegara (1990).

Kualitas Penduduk

Dengan meningkatnya pendapatan penduduk, pendidikan, dan kebebasan masyarakat, maka kualitas penduduk pun meningkat pula. Menurut UU Kependudukan No. 10 Tahun 1992, pasal 1, ayat 4, pengertian kualitas penduduk ialah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik serta ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang berbudaya, berkepribadian, dan layak. Indikator kualitas fisik adalah sebagai berikut:

1. status gizi (*nutritional status*),
2. status kesehatan (*health status*),
3. kebugaran jasmani (*bodily state*), dan
4. kesegaran jasmani (*physical fitness*).

Kualitas nonfisik (KNF) adalah ciri-ciri kualitas yang bersifat batiniah. Dimensi-dimensi KNF yang perlu dikembangkan adalah sebagai berikut:

1. kemandirian,
2. solidaritas sosial,
3. ketakwaan,
4. ketahanan mental, dan
5. kecerdasan dan keserasian dengan lingkungan.

Kualitas fisik lebih mudah mengukurnya dibandingkan dengan kualitas nonfisik karena aspek-aspek yang diukur serta cara mengukurnya sudah jelas. Salah satu indikator pengukur kualitas fisik adalah Physical Quality of Life Index (PQLI) yang sering diterjemahkan dengan Indeks Mutu Hidup (IMH). Variabel yang digunakan untuk mengukurnya adalah Angka Kematian Bayi (Infant Mortality Rate = IMR), Usia Harapan Hidup setelah berumur 1 tahun (e1), dan persentase melek huruf dari penduduk dewasa berumur 15 tahun (LIT). Tujuan dari pengukuran ini ialah untuk mengukur sejauh mana basil pembangunan yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia dari segi kualitas fisik kehidupan. Nilai skor PQLI biasanya berkisar antara 0-100.

Pada tahun 1987 nilai PQLI di Propinsi Bali sebesar 72,01. Dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya, maka terjadi peningkatan rata-rata sebesar 3,3 persen per tahun. Nilai PQLI untuk kota lebih tinggi dibandingkan dengan pedesaan. Untuk Propinsi Bali, pada tahun 1987 nilai PQLI untuk daerah kota sebesar 80,17, untuk pedesaan sebesar 69,06 (Bappeda Tingkat I Bali, 1989).

Apabila dilihat per kabupaten, Kabupaten Tabanan mempunyai nilai PQLI tertinggi (84,86), disusul oleh Kabupaten Badung (83,67), Kabupaten Jembrana (76,85), dan Kabupaten Klungkung (75,30). Kabupaten-kabupaten lain nilainya di bawah 70 (Tabel 6).

Sebagai perbandingan, pada tahun 1985 nilai PQLI untuk Indonesia sebesar 71. Propinsi-propinsi dengan nilai PQLI di atas 80 adalah DKI Jakarta (87) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (81), sedangkan propinsi dengan nilai PQLI terendah adalah Nusa Tenggara Barat sebesar 51.

TABEL 6.
INDEKS MUTU HIDUP MENURUT KABUPATEN, PROPINSI BALI TAHUN 1985 DAN 1987

Kabupaten	1985	1987
Jembrana	72,00	76,85
Tabanan	79,47	84,86
Badung	77,02	83,67
Gianyar	60,52	65,95
Klungkung	68,09	75,30
Baugli	52,97	59,27
Karangasem	56,05	62,89
Buleleug	58,65	66,48

Sumber: Bappeda Tingkat I Bali, 1989.

Usaha-usaha Lain yang Mempengaruhi Variabel Kependudukan

Sejalan dengan meningkatnya industri pariwisata yang mempengaruhi variabel kependudukan, pembangunan di sektor lain juga mempunyai andil dalam mengubah struktur penduduk. Dua sektor yang dibahas dalam makalah ini, pertama sektor kesehatan masyarakat dan kedua sektor keluarga berencana.

Aktivitas sektor kesehatan masyarakat cukup banyak satu di antaranya adalah aktivitas untuk mempertahankan kelangsungan hidup anak (*child survival*). Program ini dapat menurunkan dengan cepat angka kematian bayi* dan meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir.

Pada tahun 1990 angka kematian bayi Propinsi Bali sebesar 41 orang tiap 1000 kelahiran. Angka ini menunjukkan kematian urutan ketiga terendah di antara 27 propinsi di Indonesia. Urutan pertama terendah adalah DKI Jakarta sebesar 41 (Tabel 7). Sebaliknya, angka kematian bayi tertinggi (145) terdapat di Propinsi Nusa Tenggara Barat.

Angka kematian bayi di perkotaan lebih rendah dibandingkan dengan di pedesaan. Pada tahun 1990 di Propinsi Bali angka kematian bayi di perkotaan sebesar 31 sedangkan di pedesaan sebesar 55. Sebagai perbandingan angka kematian bayi di Indonesia untuk

perkotaan sebesar 52 untuk pedesaan sebesar 77 (Kasto, 1992).

Program Keluarga Berencana (KB) dapat dilaksanakan dengan sukses di Bali. Program ini dilaksanakan lewat organisasi banjar di Bali. Hasilnya tidak hanya dapat menurunkan angka kelahiran, tetapi juga dapat memasyarakatkan gagasan Keluarga Kecil.

Ada beberapa ukuran fertilitas yang biasa digunakan oleh ahli demografi; namun demikian, yang paling umum digunakan adalah Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate*)**. Biro Pusat Statistik telah membuat perkiraan Angka Fertilitas Total untuk masing-masing propinsi berdasarkan data hasil Sensus Penduduk 1980, 1990, dan SUPAS (*intercensal survey*) tahun 1985 untuk tiga periode, yaitu 1976, 1979, 1981-1984, dan 1986-1989 seperti terlihat dalam Tabel 8.

Dari Tabel 8. terlihat bahwa di seluruh propinsi terjadi penurunan Angka Fertilitas Total. Untuk periode tahun 1986-1989 Angka Fertilitas Total Propinsi Bali sebesar 2275, berarti setiap 1000 wanita yang telah mengakhiri usia subur melahirkan 2275 anak laki-laki dan wanita. Angka ini terendah kedua di seluruh propinsi Indonesia setelah Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 2082.

Kalau persyaratan untuk mengakhiri masa transisi demografi dibutuhkan nilai

* Angka Kematian Bayi ialah jumlah kematian bayi (kematiaan sebelum berumur satu tahun) pada tahun tertentu tiap 1000 kelahiran hidup (*live birth*).

** Angka Fertilitas Total adalah jumlah anak lahir hidup yang dilahirkan oleh 1000 wanita hingga akhir masa reproduksinya (umur 15-49 tahun) dengan asumsi; 1. tidak ada wanita yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya; 2. angka kelahiran menurut umur tidak berubah dalam periode waktu tertentu.

TABEL 7.

ANGKA KEMATIAN BAYI DAN PROYEKSINYA MENURUT PROPINSI TAHUN 1980, 1990, DAN 200

PROPINSI	Angka Kematian Bayi		Tingkat Penurunan Setiap Tahun (%)	Perkiraan Angka Kematian Bayi Tahun 2000
	1980	1990		
Daerah Istimewa Aceh	93	57	4,78	35
Sumatra Utara	88	59	3,92	40
Sumatra Barat	121	71	5,19	42
Riau	111	65	5,21	38
Jambi	118	71	4,95	43
Sumatra Selatan	121	70	5,33	40
Bengkulu	106	68	4,34	44
Lampung	97	69	3,35	49
DKI Jakarta	80	38	7,17	18
Jawa Barat	131	89	3,79	60
Jawa Tengah	94	63	3,92	42
DI Yogyakarta	58	41	3,41	39
Jawa Timur	97	62	4,38	40
Bali	90	49	5,90	27
Nusa Tenggara Barat	188	145	2,56	112
Nusa Tenggara Timur	126	74	5,18	43
Timor Timur	-	82	4,29*	53
Kalimantan Barat	117	80	3,37	55
Kalimantan Tengah	100	56	5,63	31
Kalimantan Selatan	122	91	2,89	68
Kalimantan Timur	99	56	5,54	32
Sulawesi Utara	93	63	3,82	43
Sulawesi Tengah	129	89	3,64	61
Sulawesi Selatan	108	69	4,38	44
Sulawesi Tenggara	112	76	3,80	52
Maluku	123	75	4,83	46
Irian Jaya	107	79	2,99	58
Indonesia	107	69	4,29	45

* Diasumsikan tingkat penurunan kematian bayi setiap tahun sama dengan angka nasional: 4,29 persen.

Sumber: Kasto (1992).

TABEL 8.
ANGKA FERTILITAS TOTAL MENURUT
PROPINSI PADA PERIODE TAHUN 1976-1979, 1981-1984, DAN 1986-1989

PROPINSI	1976-1979	1981-1984	1986-1989	2000
Daerah Istimewa Aceh	5235	4790	4367	3452
Sumatra Utara	5935	5125	4289	3060
Sumatra Barat	5755	4805	3890	2878
Riau	5435	4705	4088	3208
Jambi	5570	4620	3759	2666
Sumatra Selatan	5585	4780	4223	3248
Bengkulu	6195	5135	3969	2855
Lampung	5750	4795	4054	3026
DKI Jakarta	3980	3250	2326	1390
Jawa Barat	5070	4305	3468	2348
Jawa Tengah	4370	3820	3049	2122
DI Yogyakarta	3415	2930	2082	1224
Jawa Timur	3555	3200	2456	1610
Bali	3970	3090	2275	1227
Nusa Tenggara Barat	6490	5735	4975	4114
Nusa Tenggara Timur	5540	5120	4608	3897
Timor Timur	-	-	5279	-
Kalimantan Barat	5520	4980	4437	3543
Kalimantan Tengah	5870	4765	4829	2861
Kalimantan Selatan	4595	3740	3238	2316
Kalimantan Timur	4985	4160	3275	2366
Sulawesi Utara	4905	3555	2687	1482
Sulawesi Tengah	5908	4855	3853	2736
Sulawesi Selatan	4875	4125	3538	2595
Sulawesi Tenggara	5820	5660	4908	4110
Maluku	6155	5610	4593	3528
Irian Jaya	5350	4835	4701	3562
Indonesia	4680	4055	3326	2370

Sumber: BPS., Tabel 2. (tidak dipublikasikan).

Angka Fertilitas Total sebesar 2237, maka pada periode 1986-1989 Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengakhiri masa transisi demografinya dan Propinsi Bali sudah berada di ambang pintu.

Apabila diasumsikan bahwa hingga tahun 2000 laju penurunan kelahiran akan tetap, seperti tahun 1971-1990, maka Angka Fertilitas Total untuk Propinsi Bali sebesar 1227. Propinsi-propinsi lain yang Angka Fertilitas Total tahun 2000 di bawah 2237 adalah Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara.

Kesimpulan

Pembangunan sektor pariwisata, sektor kesehatan masyarakat, dan keluarga berencana mengubah struktur demografi penduduk Pulau Bali baik di perkotaan maupun di pedesaan. Kalau sebelum tahun 1970-an penduduk mengelompok pada daerah-daerah yang mempunyai potensi pertanian yang tinggi, tetapi sekarang juga mengelompok pada pusat-pusat aktivitas pariwisata. Jadi dewasa ini ketimpangan persebaran penduduk di pedesaan-pedesaan Bali sudah mulai menyusut.

Aktivitas industri pariwisata tidak hanya terdapat di pusat-pusat kegiatan wisata, tetapi juga di pedesaan mengingat kekhasan budaya Bali umumnya terdapat di pedesaan. Walaupun desa-desa di Bali dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu desa domisili, desa kunjungan, dan desa penunjang, tetapi aktivitasnya saling menunjang dan saling menguntungkan.

Industri pariwisata dapat merangsang penduduk pedesaan untuk memanfaatkan kesempatan ekonomi yang ada. Sebagai contoh, di beberapa desa muncul perkumpulan tari-tarian yang siap dipasarkan di hotel-hotel. Di desa lain, penduduk membuat ukiran-ukiran dari kayu dan pembuatan kain dengan corak tradisional. Usaha-usaha ini dapat meningkatkan tingkat ekonomi penduduk pedesaan.

Pembangunan bidang fisik dan nonfisik di pedesaan yang diikuti oleh prasarana transport dan komunikasi menyebabkan hubungan desa-kota semakin erat. Keeratan hubungan ini menyebabkan rendahnya perbedaan struktur demografi antara desa dan kota.

Di bidang kependudukan, migran masuk dengan jumlah besar menimbulkan masalah sosial. Para migran tersebut umumnya terdiri dari migran nonpermanen, datang ke Bali untuk mendapatkan pekerjaan. Di samping bekerja sebagai buruh bangunan, mereka juga bekerja pada sektor informal di kota-kota. Sehubungan dengan jumlah mereka yang besar, kota-kota dan pusat-pusat pariwisata tidak mampu menampung seluruh migran yang masuk, akhirnya meluber ke desa-desa yang sering menimbulkan masalah-masalah sosial. Umumnya para migran enggan kembali ke daerah asal walaupun kontrak kerja mereka telah selesai. Pendapatan yang mereka peroleh di Bali dalam kesatuan waktu yang sama jauh lebih besar dibandingkan dengan di daerah asal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bappeda Tingkat I Bali. 1989. *Indeks mutu hidup penduduk propinsi daerah tingkat I Bali 1985, 1986, dan 1987*. Denpasar: Bappeda Tingkat I. Bali.
- Biro Pusat Statistik. 1975. *Penduduk Indonesia: hasil Sensus Penduduk 1971*. Jakarta.
- . 1983. *Penduduk Indonesia: hasil Sensus Penduduk 1980*. Jakarta.
- . 1987. *Penduduk Indonesia: hasil Survei Penduduk Antar Sensus 1985*. Jakarta.
- . 1991. *Penduduk Indonesia: hasil Sensus Penduduk 1990*. Jakarta.
- . 1992. *Penduduk Indonesia: hasil Sensus Penduduk 1990*. Jakarta.
- Diparda TK I Bali dan Kantor Statistik Propinsi Bali. 1987. *Data kepariwisataan propinsi daerah TK I Bali 1986*. Denpasar: Diparda TK I Bali.
- Geriya, Wayan. 1983. *Pariwisata dan segi-segi sosial budaya masyarakat Bali*. Denpasar: Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra UNUD.
- Kantor Statistik Propinsi Bali. 1991. *Penduduk Bali hasil Sensus Penduduk 1990*. Denpasar: Kantor Statistik Propinsi Bali.
- Kasto. 1992. "Variasi tingkat kematian bayi dan harapan hidup di Indonesia menurut propinsi: hasil Sensus Penduduk 1990", *Populasi*, 2(3): 18.
- Mabogunje, M. L. 1970. "System approach to a theory of rural urban migration", *Geography Analysis*, 2: 1-18.
- Mantra dan Kutaneegara. 1980. "Dampak industri pariwisata terhadap kehidupan sosial budaya di Ubud", *Populasi*, 1(2): 73-90.